

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Beberapa waktu terakhir jika diamati, masyarakat Indonesia banyak yang berusaha atau menyuarakan pendapat terhadap suatu isu yang sedang ramai di media sosial (Anonim, 2016). Kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, penyampaian pendapat tersebut bergantung pada kebijakan di suatu negara. Syamsir (2015) mengemukakan dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28 bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 juga menyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia (Pasal 28 E ayat (3)) (Qulub, 2018).

Kebebasan berpendapat pada masyarakat semakin terbuka seiring dengan perkembangan media sosial. Media sosial membuat pengguna semakin bebas berpendapat (Anam, 2022). Media sosial memungkinkan informasi apapun tersebar secara luas di internet tanpa menyaring apakah

konten tersebut baik atau buruk. Mayolaika (2021) menyebutkan bahwa konten yang baik di media sosial merupakan hal yang bermanfaat bagi penggunanya, tapi konten buruk tentu akan merugikan (Rachman, dkk, 2021).

Selain itu, media sosial merupakan media informasi elektronik yang dapat berfungsi untuk menunjang atau memperbaharui informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (Mayolaika, 2021). Melalui media informasi ini masyarakat dapat mengetahui informasi yang sedang berkembang, dapat saling berinteraksi, dan ada pesan atau tujuan yang disampaikan pada target pembaca. Criticos (dalam Daryanto, 2010) mengemukakan media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi dengan mudah dan dimana saja menggunakan *handphone* atau alat komunikasi lainnya yang dapat terhubung ke internet. Menurut Kusumawardani (2016) media sosial adalah media yang bebas digunakan, tetapi perlu adanya etika dalam membatasi kebebasan yang ada. Etika dapat membantu dalam berperilaku ketika menggunakan media sosial yang biasanya digunakan untuk menyebarkan berita-berita yang kurang baik. Media sosial dapat membuat masyarakat melakukan suatu gerakan atau aksi yang disampaikan pada media informasi tersebut. Karena adanya media sosial yang membuat masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya, maka masyarakat yang merasa sama pendapatnya akan ikut menyuarakan pendapatnya juga di media sosial (Anonim, 2022).

Seperti beberapa waktu terakhir ada aksi yang ramai disuarakan, yaitu aksi yang mendukung Palestina. Dengan bentuk aksi seperti penggalangan dana melalui *platform* KitaBisa.com, dan bentuk aksi berupa petisi. Selain itu, pada media informasi seperti X (dahulu *twitter*) banyak masyarakat yang menyuarakan aksi tagar #FreePalestine #IsraelGenocide. Masyarakat juga menyuarakan aksi bela Palestina menggunakan gambar atau ilustrasi buah semangka yang menjadi simbol Palestina. Nazaruddin (2023) menjelaskan semangka merupakan simbol perlawanan Palestina sejak 1960-an, dan jika semangka dibelah memiliki paduan warna yang sama dengan bendera Palestina.

Sebelumnya, di Indonesia pernah terjadi Aksi Bela Islam. Aksi tersebut muncul karena adanya pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pulau Pramuka pada 27 September 2016 silam, setelah video Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 *viral* di media sosial, Ahok mendapat banyak kecaman (CNN, 2019). Tercatat 14 laporan soal penodaan agama yang dilayangkan untuk Ahok. Aksi yang masyarakat lakukan adalah mengawal proses hukum, seperti pemrosesan hukum hingga menuntut Ahok untuk ditahan. Penyebaran wacana Gerakan Bela Islam tersebar melalui postingan foto, video serta tagar atau *hashtag* (#) yang menyuarakan wacana Gerakan Bela Islam 212 di media-media sosial.

Wacana gerakan bela islam pun menjadi trending di beberapa *platform* media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan *Youtube*. Penyebaran

wacana seperti ini akhirnya membuat banyak orang ikut memberi perhatian terhadap isu-isu terkait Islam khususnya kasus Ahok terkait Surah al-Maidah ayat 51 (Jubba, dkk, 2020). Pada 2 Desember 2018 dilakukannya aksi reuni untuk mempengaruhi pemilihan Presiden tahun 2019. Dari fenomena di atas aksi-aksi tersebut masuk ke dalam bentuk representasi kelompok Muslim di Indonesia.

Menurut Hall (2005) representasi adalah kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan. Selain itu dalam KBBI (edisi V) representasi didefinisikan sebagai perbuatan yang mewakili (perwakilan). Maka representasi kelompok adalah seseorang atau individu yang melakukan perbuatan yang mewakili suatu kelompok atas dasar menggambarkan atau membayangkan suatu peristiwa. Hall (2005) mengemukakan pentingnya representasi sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial, bahkan ia menegaskan representasi sebagai kebutuhan dasar komunikasi. Selain itu, ketika suatu kelompok manusia telah memiliki pengalaman yang sama dan cara yang sama dalam merepresentasi makna terhadap sesuatu, maka mereka akan memiliki pandangan dan visi yang sama dalam melihat hal, benda, objek, kejadian, atau manusia lain.

Ahmad (2009) memaparkan bahwa proses representasi sangat erat kaitannya dengan identitas, karena seseorang mendapatkan identitas ketika eksistensinya dimaknai oleh orang lain. Identitas yang dimaksudkan di sini adalah identitas budaya, suatu identitas cair yang berubah-ubah tergantung

dengan siapa seseorang berinteraksi, kapan, dan dimana ia berada. Identitas juga dapat diberikan oleh diri sendiri dalam cara merepresentasi atau memproduksi makna untuk diri sendiri. Seperti pada fenomena-fenomena yang sebelumnya telah dijelaskan, masyarakat atau individu dapat membayangkan bagaimana rasanya dijajah, merasa terhina karena seseorang menistakan agamanya.

Purnaningsih & Yuniari (2020) mengemukakan bahwa Agama merupakan sumber moral, kebenaran bimbingan ke hadapan umat baik suka maupun duka. Selain itu Agama juga merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada seberapa taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Kemudian, sebagai agama yang luas dan kompleks, Islam mengandung berbagai aspek yang meliputi agama, moralitas, hukum, dan politik. Prinsip-prinsip Islam mencakup pedoman tentang tata kelola pemerintahan, pengaturan hukum, keadilan sosial, dan partisipasi politik. (Khasanah, 2023). Selain itu, kelompok-kelompok Islam sering kali menekankan pentingnya penerapan hukum syariah dan mempertahankan identitas agama mereka dalam kerangka politik yang sekuler (Husaini, dkk, 2022). Oleh karena itu kelompok Muslim mengalami kontroversi sosial dan politik sebagai keniscayaan atau sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sehingga

kelompok Islam atau Muslim selalu muncul dan berhadapan untuk meneguhkan keberadaan dan pengaruhnya (Qodir, 2017). Terdapat kaitan *identity fusion* dengan *collective action*, yaitu perasaan menyatu dengan kelompoknya dan dapat memunculkan motivasi kepada anggota lainnya untuk *pro-group*. Kemudian, aksi yang dapat dilakukan dengan sekelompok individu yang bertujuan untuk memperbaiki situasi, dan status kelompoknya.

Dengan adanya representasi kelompok, masyarakat merasa memiliki perasaan yang sama dengan penduduk Palestina, masyarakat merasa menjadi bagian yang sama dengan Palestina, dan masyarakat juga merasa bahwa ada di dalam kelompok yang sama yaitu kelompok Muslim. Alasan mengapa orang atau individu mau melakukan *collective action* pada fenomena tagar bela Palestina yaitu masyarakat Indonesia dan Palestina saudara sesama umat Muslim, Indonesia juga pernah merasakan rasanya dijajah oleh bangsa lain, dan sulitnya keadaan ketika dijajah (Menteri Agama, 2017). Alasan masyarakat melakukan aksi bela Islam yaitu keterlibatan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena adanya opini publik anti-Ahok timbul, menyebar khususnya melalui media sosial (Fealy, 2016).

Fenomena bela Palestina dan aksi bela Islam 2016 dapat dikategorikan atau disebut sebagai *Collective action*, karena tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mengubah posisi atau situasi kelompok dapat berkaitan dengan kondisi didiskriminasi, dirugikan, dan ketidakadilan yang dialami kelompok (Koomen & Pligt, 2016; Tausch dkk., 2011). Kemudian, identitas

keagamaan dapat berperan pada *collective action normative* (damai) untuk memajukan tujuan agama (Phalet dkk., 2010) dan untuk tujuan solidaritas (Shadiqi, Muluk, & Milla, 2020). Sehingga masyarakat terdorong untuk menyuarakan suatu aksi, yaitu bela Palestina dan bela Islam Jilid III. Dalam penelitian Shanaah & Lindekilde (2019) bentuk aksi yang dilakukan adalah berunjuk rasa di pusat kota Birmingham untuk membela jihadis. Mereka melakukan aksi tersebut karena adanya seruan untuk kontra-ekstremisme. Aksi mereka masuk ke dalam *collective action*, karena terdapat surat yang dikirim ke masjid-masjid di Inggris oleh Sekretaris dan Wakil Sekretaris Departemen Luar Negeri, setelah terjadinya serangan teroris di Paris pada tahun 2015. Para pemimpin agama diminta untuk secara terbuka menjelaskan dan mendemonstrasikan “bagaimana iman dalam Islam dapat menjadi bagian dari identitas Inggris” dan untuk mengemukakan gagasan tentang bagaimana “memastikan bahwa pesan perdamaian Islam yang sebenarnya menang atas mereka yang ingin memecah-belah kita.”

Collective action dapat diartikan sebagai aksi yang dilakukan sekelompok individu dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi dari kelompoknya dan sebagai bentuk representasi kelompok (Wright, Taylor, & Moghaddam, 1990). Selain memperbaiki kondisi, tindakan *collective action* juga mampu meningkatkan status kelompok tersebut dari kelompok yang lain (Tajfel, & Turner, 1979). Selain itu menurut Tilly (1978) *collective action* adalah aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara Bersama untuk

mencapai kepentingan Bersama, yang merupakan hasil interaksi antara satu kelompok dengan kelompok lain, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan kolektif.

Opini publik mampu menyebabkan pergerakan massa umat Muslim dari penjuru tanah air. Karena hadirnya media sosial sangat membantu dalam proses penyebaran informasi untuk menggalang massa (Riswandari, 2017). Menurut Qibtiyah dan Wildan (2016) bahwa yang mengikuti aksi itu (bela Islam) beralasan ideologis, ada juga yang mengikuti secara partisan, karena mereka ikut partai atau kelompok tertentu. Pada kedua fenomena tersebut didasari oleh identitas yang ada pada masing-masing individu. Sejauh mana masyarakat membayangkan rasanya terjajah, sesama Muslim yang sedang merasakan berperang melawan penjajah, merasa direndahkan karena adanya penistaan agama. Maka, identitas sosial merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi *collective action*.

Identitas sosial menurut Tajfel (1979) merupakan perasaan seseorang tentang siapa mereka berdasarkan keanggotaan kelompok mereka, identitas sosial juga membuat individu menjadi *ingroup* “Kami” dan *outgroup* “Kalian”. Maka dari itu, identitas sangat mempengaruhi individu untuk terlibat atau tidak pada suatu aksi, karena menurut Van Stekelenburg dan Klandermans (2009) *collective action* lebih berkaitan dengan keputusan individu untuk terlibat atau tidak pada suatu aksi. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok akan memilih untuk melakukan aksi. Karena mereka merasa

bagian kelompok yang sama. Identitas sosial berfokus pada diri pribadi dalam kelompok-kelompok tertentu, jika menggambarkan tingkat kekuatan, ‘kesatuan’ identitas seseorang terhadap kelompoknya, dapat dikatakan identitas sosial mereka dalam kelompok tersebut sangat kuat, dalam psikologi sosial disebut dengan *identity fusion* (Widhyastuti, 2019). *Identity fusion* sering dianggap sebagai tingkatan yang lebih dalam dari identitas sosial, dan dapat memotivasi individu agar melakukan suatu aksi yang berkaitan dengan kelompoknya karena adanya peleburan identitas diri dan juga identitas sosial atau kelompoknya. Tidak seperti identitas sosial yang hanya berdasarkan identitas keanggotaan kelompoknya saja.

Identity fusion didefinisikan sebagai perasaan sangat menyatu dan keterhubungan yang dirasakan individu dengan *ingroup*, kelompok dimana dia berada (Fredman, et al., 2015; Swann Jr. & Buhrmester, 2015). *Identity fusion* merujuk pada anggota kelompok tertentu karena terjadinya peleburan identitas diri personal dan identitas diri sebagai anggota kelompok (Newson, et al., 2018). Selain itu *identity fusion* adalah rasa “kesatuan” yang mendalam dengan kelompok dan individu yang memotivasi perilaku *pro-group* pada kelompok tersebut (Swann, 2015). *Identity fusion* membuat individu sebagai anggota kelompok akan melakukan tindakan yang selalu *pro-group* (Fredman, et al., 2015). Teori di atas berkaitan dengan fenomena bela Palestina dan aksi bela Islam, karena masyarakat yang melakukan aksi

tersebut memiliki identitas sosial yang sama yaitu sebagai umat Muslim hal tersebut dapat memotivasi masyarakat Indonesia untuk melakukan *pro-group*.

Media sosial memiliki peran yang penting dalam membentuk *identity fusion* dan dapat mempengaruhi *collective action*. Karena media sosial terdapat konten yang dibagikan untuk memperkuat identitas tersebut, dan dapat membuat individu berpartisipasi melakukan tindakan yang mendukung kelompoknya dengan berbagai cara, seperti berpartisipasi dalam *collective action*. Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, pada penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana identitas individu dan kelompok (Muslim) melebur dan dapat mempengaruhi partisipasi individu untuk terlibat dalam *collective action*.

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan, peneliti ingin meneliti terkait pengaruh *identity fusion* terhadap *collective action* pada kelompok Muslim di Indonesia. kemudian, peneliti dapat memahami pengaruh *identity fusion* terhadap *collective action* dan menambah wawasan tentang dinamika psikologis dan sosial dalam *identity fusion* dan *collective action*.

1.2. Identifikasi Masalah

Kelompok Muslim biasanya terlibat dalam aksi yang berkaitan dengan isu agama. Individu merasa memiliki identitas yang sama yaitu sebagai seorang Muslim. Selain itu mereka merasa identitas tersebut melebur dalam dirinya menjadi satu kesatuan, dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh

Muslim lainnya, hal tersebut dapat memunculkan rasa motivasi dalam dirinya untuk melakukan *pro-group* (Fredman, et al., 2015; Swann, 2015). Seperti pada fenomena Bela Palestina dan Bela Islam 2016, yang telah dipaparkan di atas, masyarakat Indonesia yang melakukan aksi merasa jika mereka memiliki identitas sosial yang sama dengan rakyat Palestina yaitu seorang Muslim, merasakan seperti apa rasanya dijajah, karena sebelum kemerdekaan Indonesia pernah dijajah oleh penjajah. Lalu menuntut keadilan ketika agamanya dinistakan oleh seseorang. Hal tersebut terjadi karena adanya bentuk representasi kelompok yang bertujuan untuk memperbaiki, dan mengubah status kelompoknya. Maka perasaan tersebut dapat membuat masyarakat melakukan *collective action* (Wright, Taylor, & Moghaddam, 1990). *Collective action* menurut Wright, Taylor, & Moghaddam (dalam Tajfel, & Turner, 1979) merupakan tindakan yang dilakukan sekelompok individu dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi dari kelompoknya. Selain memperbaiki kondisi, tindakan *collective action* juga mampu meningkatkan status kelompok tersebut dari kelompok yang lain. Karena identitas pribadi dan kelompok yang melebur pada diri individu dapat mempengaruhi individu untuk terlibat dalam *collective action*. Oleh karena itu peneliti ingin menguji apakah ada pengaruh *identity fusion* terhadap *collective action* pada kelompok Muslim di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh *identity fusion* terhadap *collective action* pada kelompok Muslim di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.1.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu sebagai pembaharuan penelitian, menambah pengetahuan peneliti lainnya mengenai bidang psikologi sosial terkait variabel *identity fusion* dan *collective action*. Kemudian dapat sebagai landasan untuk peneliti selanjutnya pada penelitian-penelitian pengaruh *identity fusion* terhadap *collective action* kedepannya.

1.1.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah adalah dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *collective action*, pemerintah dapat merancang kebijakan yang efektif dalam mencegah potensi konflik sosial dalam konteks agama.

2. Bagi umat Muslim

Bagi umat Muslim, dapat mengetahui jika *collective action* dapat muncul atau terjadi karena adanya *identity fusion* pada diri sendiri. Sehingga dapat memilih dan memilah aksi mana yang harus diikuti.